



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

2020-2024



PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ~ *i*

DAFTAR TABEL ~ *iii*

DAFTAR GAMBAR ~ *iv*

DAFTAR GRAFIK ~ *v*

BAB I PENDAHULUAN ~ **1**

1. 1. Kondisi Umum ~ **1**

1. 2. Tugas Pokok dan Fungsi ~ **3**

1. 3. Struktur Organisasi ~ **4**

1. 4. Capaian Renstra Direktorat Deposit Bahan Pustaka 2015-2019 dan Renstra Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka 2015-2019 ~ **4**

1. 5. Potensi dan Permasalahan ~ **11**

1.5.1. Potensi ~ **11**

1.5.2. Permasalahan ~ **16**

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ~ **20**

2.1. Visi Perpustakaan Nasional ~ **20**

2.2. Misi Perpustakaan Nasional ~ **20**

2.3. Tujuan Pembangunan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **20**

2.4. Sasaran Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **20**

2.5. Peta Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **22**

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI ~ **24**

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional ~ **24**

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **25**

3.3. Kerangka Regulasi ~ **29**

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ~ 31

4.1. Target Kinerja Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **31**

4.2. Kerangka Pendanaan ~ **32**

BAB V PENUTUP ~ 34

LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **36**

LAMPIRAN 2 Matriks Kerangka Regulasi ~ **39**

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Penghimpunan KCKR Tahun 1990-2019 ~ **7**
- Tabel 1.2. Pengadaan Bahan Perpustakaan Tertulis, Tercetak, dan Terekam Tahun 2015-2019 ~ **9**
- Tabel 1.3. Kekuatan SDM Berdasarkan Pendidikan ~ **15**
- Tabel 1.4. Kekuatan SDM Berdasarkan Jabatan ~ **15**
- Tabel 2.1. Sasaran Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Tahun 2020-2024 ~ **21**
- Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi ~ **31**
- Tabel 4.2. Target Kinerja Sasaran Program Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **32**
- Tabel 4.3. Alokasi Anggaran Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Berdasar Program (dalam ribu rupiah) ~ **33**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **4**

Gambar 2.1. Peta Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ~ **22**

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1. Grafik Peningkatan Jumlah Koleksi Perpustakaan Nasional ~ **5**
- Grafik 1.2. Grafik Jumlah Koleksi Perpustakaan Nasional s.d. Tahun 2019 ~ **6**
- Grafik 1.3. Penghimpunan KCKR Tahun 2015-2019 ~ **7**
- Grafik 1.4. Grafik Penambahan Koleksi Naskah Kuno Perpustakaan Nasional 2015-2019 ~ **11**
- Grafik 1.5. Grafik Perbandingan Potensi Terbitan dan Hasil Pelaksanaan Kewajiban UU SSKCKR Tahun 2019 ~ **16**

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Kondisi Umum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dewasa ini mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan. Fenomena tersebut membuka kesempatan baru bagi perpustakaan untuk mengembangkan koleksi dari format konvensional ke format digital, mengembangkan layanan *onsite* ke layanan *online*, atau secara kompleksitas pengelolaan perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Teknologi informasi menjadi pendorong percepatan distribusi dan akses informasi di masyarakat. Perpustakaan harus terus berupaya menjangkau pemustaka untuk memanfaatkan layanan dengan melakukan konvergensi melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan perangkat bergerak (*mobile device*) dalam dunia perpustakaan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian perpustakaan juga dituntut untuk menyediakan sumber informasi dalam format digital yang dapat diakses dengan berbagai perangkat berbasis TIK serta didukung tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam pengelolaan dan pelayanannya.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (selanjutnya disebut UU Perpustakaan) menegaskan bahwa Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, yang memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Selanjutnya dalam UU tersebut ditegaskan beberapa hal mengenai pelayanan teknis perpustakaan berupa kepentingan pengembangan koleksi di lingkup nasional, deposit karya cetak dan karya rekam, serta pelestarian dan penelitian bahan perpustakaan, termasuk naskah nusantara sebagai warisan dokumenter budaya bangsa.

Selanjutnya dalam UU Perpustakaan Pasal 7 dinyatakan bahwa salah satu kewajiban Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan. Berkaitan dengan pengembangan koleksi, dalam

Pasal 21 juga disebutkan bahwa Perpustakaan Nasional bertanggung jawab untuk mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan budaya bangsa, serta mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Menurut UU Perpustakaan, koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional memiliki peran sentral dalam upaya memperkuat koleksi nasional, di antaranya dengan mengoptimalkan penghimpunan karya cetak dan karya rekam sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (selanjutnya disebut UU SSKCKR), serta melaksanakan pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional yang bertujuan untuk menyediakan koleksi yang komprehensif dan mutakhir bagi pemustaka.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU SSKCKR, sebagai perpustakaan deposit Perpustakaan Nasional memiliki tugas untuk mengelola seluruh terbitan hasil serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. perpustakaan mempunyai peranan yang penting dalam menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

Penerbitan karya cetak dan publikasi karya rekam dewasa ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai dengan semakin banyaknya penerbit dan produsen karya rekam yang menerbitkan karyanya dalam bentuk digital. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Perpustakaan Nasional untuk dapat menghimpun dan melestarikan semua karya tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

1. 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, dalam Pasal 27 disebutkan bahwa Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Selanjutnya disebutkan bahwa Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan.

Sehubungan tugas tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- e. pengembangan koleksi nasional;
- f. pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi deposit, diperkuat pula dengan diterbitkannya UU SSKCKR, kewajiban Perpustakaan Nasional melalui unit kerja Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan koleksi hasil serah simpan yang dibagi ke dalam 5 (lima) area utama yaitu; penerimaan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

1. 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, maka struktur organisasi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

1. 4. Capaian Renstra Direktorat Deposit Bahan Pustaka 2015-2019 dan Renstra Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka 2015-2019

Capaian Renstra merupakan analisis dari proses pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun pelaksanaan Renstra. Berdasarkan hasil restrukturisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, terjadi beberapa penyesuaian khususnya dalam lingkup Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa unit kerja baru hasil dari penggabungan/pemisahan unit kerja lama. Salah satu unit kerja baru tersebut adalah Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang merupakan bentukan dari Subdirektorat Deposit Bahan Pustaka (sebelumnya dalam naungan

Direktorat Deposit Bahan Pustaka) dan Bidang Akuisisi (sebelumnya dalam naungan Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka). Dengan demikian, pada periode Renstra sebelumnya, yaitu Tahun 2015-2019, capaian kinerja yang dapat dilaporkan merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan unit kerja sebelumnya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penguatan koleksi nasional, Perpustakaan Nasional telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang salah satunya adalah penambahan koleksi Perpustakaan Nasional. Program/kegiatan tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dan secara berkesinambungan terus ditingkatkan. Pencapaian penambahan koleksi Perpustakaan Nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1. Grafik Peningkatan Jumlah Koleksi Perpustakaan Nasional

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun periode Renstra 2015-2019, jumlah koleksi Perpustakaan Nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2019, koleksi Perpustakaan Nasional tercatat sejumlah 5.079.493 eksemplar. Jumlah koleksi tersebut terdiri atas koleksi deposit yang diperoleh dari penghimpunan serah simpan karya cetak karya rekam sebagai implementasi dari UU SSKCKR, serta koleksi layanan yang diperoleh dari pembelian, hadiah, hibah, dan tukar-menukar. Komposisi koleksi deposit dan koleksi layanan dapat dilihat pada Grafik 1.2.



Grafik 1.2. Grafik Jumlah Koleksi Perpustakaan Nasional s.d. Tahun 2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar koleksi Perpustakaan Nasional diperoleh melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar-menukar yaitu sejumlah 3.400.389 eksemplar (66,94%), sementara koleksi yang diperoleh melalui penghimpunan KCKR sejumlah 1.679.104 eksemplar (33,06%).

Ketersediaan koleksi perpustakaan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan perpustakaan. Koleksi merupakan salah satu kekuatan dan daya tarik utama bagi pemustaka untuk memanfaatkan layanan perpustakaan. Tanpa adanya koleksi secara memadai dalam hal kuantitas dan kualitas, perpustakaan tidak akan mampu menyediakan layanan yang optimal bagi pemustakanya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, koleksi yang dimiliki Perpustakaan Nasional diperoleh melalui pelaksanaan UU SSKCKR dan pengadaan koleksi melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar-menukar. Program/kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan UU SSKCKR

Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan budaya bangsa. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, salah satu kegiatan penting yang dilakukan Perpustakaan Nasional melalui Direktorat Deposit Bahan Pustaka yang bernaung dalam Deputi Pengembangan

Bahan Pustaka dan Jasa Informasi adalah melaksanakan pengelolaan serah simpan segala bentuk terbitan Indonesia. Landasan hukum yang mendasari tugas tersebut adalah UU Perpustakaan dan UU SSKCKR, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, selama kurun waktu 29 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, melalui kegiatan penghimpunan dan pengelolaan karya cetak karya rekam dihasilkan koleksi nasional sejumlah 488.671 judul dan 1.679.104 eksemplar, dengan rincian seperti dimuat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penghimpunan KCKR Tahun 1990-2019

No.	Koleksi	1990-2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Judul	Eks.	Judul	Eks.	Judul	Eks.	Judul	Eks.	Judul	Eks.	Judul	Eks.
1	Karya Cetak	183.418	827.019	27.080	43.583	24.216	61.423	67.114	125.870	45.966	110.734	57.839	130.016
2	Karya Rekam	20.781	25.711	551	587	99	137	298	368	22.770	31.829	13.637	266.182
3	PBB/TIR	24.940	53.406	424	447	990	1.125	460	570	88	97	-	-
Total		229.139	906.136	28.055	44.617	23.305	62.685	67.872	126.808	68.824	142.660	71.476	396.198

Sementara itu data penghimpunan KCKR selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik 1.3.



Grafik 1.3. Penghimpunan KCKR Tahun 2015-2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan adanya inovasi dan terobosan kegiatan dalam meningkatkan kepatuhan para wajib serah terhadap penyerahan hasil karya cetak dan karya rekam. Faktor lain yang juga berperan adalah implementasi peran aplikasi e-deposit dalam penghimpunan karya rekam/digital bagi para wajib serah dan Penerapan Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penomoran ISBN. Perka ini sangat efektif terhadap peningkatan hasil KCKR yang dihimpun. Hal ini dikarenakan pada Perka tersebut memuat pasal yang mengatur mengenai pemblokiran ISBN bagi penerbit yang belum melaksanakan kewajiban serah-simpan KCKR.

Data penghimpunan karya cetak karya rekam di atas dapat dikategorisasi berdasarkan jenis koleksi bahan perpustakaan. Karya cetak di antaranya meliputi buku, tabloid, surat kabar, majalah, buletin, laporan, jurnal, literatur kelabu, peta/atlas, buklet, poster, dan brosur. Sementara karya rekam di antaranya meliputi kaset audio, CD, VCD, DVD, CD-ROM, *laser disc*, kaset video, audio video CD, disket, *open reel*, *digital audio tape*, mikrofilm, mikrofis, dan film 35 mm.

Apabila melihat skala nasional dengan memperhatikan landasan hukumnya yang harus menghimpun dan mengelola terbitan di Indonesia dan terbitan tentang Indonesia yang terbit di luar negeri, maka capaian tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal karena baru mencapai 42% dari yang seharusnya dihimpun.

b. Pengadaan Bahan Perpustakaan untuk Koleksi Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka yang bernaung dalam Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi telah melakukan upaya pengembangan koleksi secara optimal dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki demi mewujudkan ketersediaan koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. Perpustakaan Nasional telah mengadakan berbagai jenis bahan perpustakaan, baik dalam bentuk tertulis, tercetak, maupun terekam, melalui kegiatan pembelian, penerimaan, hadiah, hibah, dan tukar-menukar. Jenis dan kuantitas bahan perpustakaan yang telah diadakan oleh Perpustakaan Nasional dalam rentang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Pengadaan Bahan Perpustakaan Tertulis, Tercetak, dan Terekam Tahun 2015-2019

No.	Jenis Bahan Perpustakaan	Jumlah (Eksemplar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	<i>E-Journal</i> Luar Negeri	148.027	123.124	42.219	492.383	605.107
2	<i>E-Book</i> Luar Negeri	333	167	936	2.059	7.127
3	<i>E-Book</i> Dalam Negeri	457	153	122	104	110
4	Serial Luar Negeri	400	1.128	14.467	419	1.679
5	Serial Dalam Negeri	10.480	13.993		17.023	11.288
6	Monografi Luar Negeri	450	190	321	1.195	2.134
7	Monografi Dalam Negeri	1.564	1.453	2.770	165.068	35.072
8	Buku Langka Dalam Negeri	-	-	-		270
9	Referensi Dalam Negeri	191	88	221		614
10	Referensi Luar Negeri	64	20	40	186	170
11	Bahan Perpustakaan <i>Local Content</i>	529	75	1.156	2.584	2.539
12	Audiovisual	525	246	398	954	3.241
13	Peta	234	266	169	140	135
14	Naskah Kuno/Manuskrip	250	138	190	447	379
15	Hasil Transliterasi Naskah Kuno	34	11	7	21	20
16	Buku Digital Dalam Negeri	-	125.876	156.700	187.150	127.240
17	Bahan Perpustakaan untuk Pemustaka Berkebutuhan Khusus	-	-	1.762	712	858
18	Lukisan	-	-	-	3	-
19	BP Hasil Hadiah, Hibah, dan Tukar-Menukar	4.971	2.380	1.271	782	2.317
	JUMLAH	168.509	269.308	222.749	871.230	800.300

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengadaan bahan perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional meliputi bahan perpustakaan dalam format analog (serial, monografi, referensi, peta, naskah kuno) dan format digital (audiovisual, *e-journal*, *e-book*). Hal ini dilakukan untuk memperluas akses informasi dan memberikan berbagai alternatif pemanfaatan koleksi bagi pemustaka, sehingga setiap pemustaka dapat memanfaatkan koleksi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

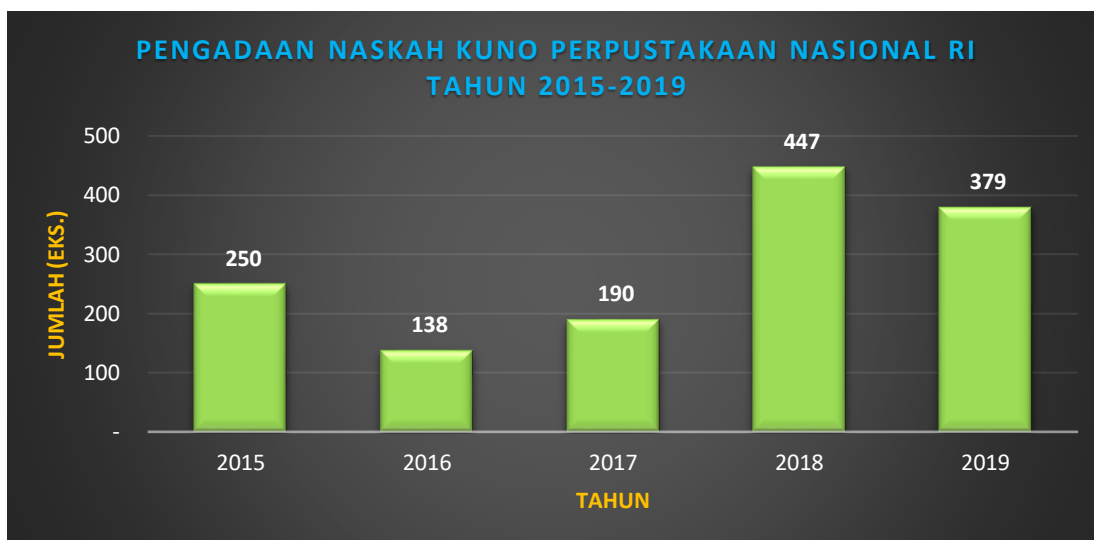
Salah satu bahan perpustakaan yang mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan koleksi adalah naskah kuno nusantara. Naskah kuno nusantara

merupakan warisan dokumenter bangsa yang bersifat unik karena ditulis tangan dengan menggunakan media, aksara, dan bahasa tradisional atau bahasa daerah dan termasuk dalam benda cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

Sebagai sumber sejarah, naskah kuno nusantara memberikan sumbangan yang amat besar bagi sejarah kebudayaan bangsa Indonesia dan memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk belajar dari segala catatan sejarah yang terkandung di dalamnya. Dalam banyak kasus, kearifan lokal yang terkandung dalam teks naskah kuno nusantara tersebut dapat menjadi alternatif solusi yang relevan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masa kini, seperti masalah yang berkaitan dengan agama, pangan dan pertanian, *gender*, kesehatan, hukum, arsitektur, permukiman, dan lain-lain. Kearifan lokal tersebut juga dapat menuntun masyarakat Indonesia untuk bersifat toleran dan menghargai keberagaman, memiliki etika dan sopan-santun, memiliki etos kerja dan jiwa kepemimpinan, serta mengutamakan semangat gotong-royong yang sesuai dengan karakter bangsa.

Saat ini keberadaan naskah kuno nusantara masih tersebar di berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Perpustakaan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya dalam mengidentifikasi dan mengadakan naskah kuno nusantara dalam rangka melestarikan fisik dan kandungan informasinya sehingga dapat diakses oleh generasi kini dan mendatang.

Sampai dengan tahun 2019, koleksi naskah kuno nusantara yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional berjumlah tidak kurang dari 12.161 eksemplar. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir selama periode Renstra 2015-2019, Perpustakaan Nasional berhasil menambah koleksi naskah kuno nusantara sejumlah 1.404 eksemplar seperti terlihat pada Grafik 1.4.



Grafik 1.4. Grafik Penambahan Koleksi Naskah Kuno Perpustakaan Nasional 2015-2019

Naskah kuno tersebut diperoleh melalui proses identifikasi keberadaan naskah kuno yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Informasi mengenai keberadaan tersebut diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya instansi pemerintahan setempat, komunitas pemerhati naskah seperti Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara), dan juga masyarakat yang memiliki naskah kuno.

1. 5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki watak kosmopolitanisme dan berkarakter dalam budaya. Bonus demografi Indonesia dan peningkatan jumlah penetrasi internet di Indonesia yang melonjak sampai dengan 52% dari jumlah penduduk, menjadi permasalahan sendiri yang perlu dihadapi oleh Indonesia. Penguatan akses informasi melalui pengembangan perpustakaan saat ini masih terkendala kepada jumlah terbitan yang terbit di Indonesia yang saat ini masih terbilang kecil. Selain itu aksesibilitas masyarakat terhadap perpustakaan masih terkendala oleh faktor sebaran jumlah perpustakaan yang tidak merata serta faktor

geografis. akibatkan kualitas layanan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Education for All Global Monitoring Report (2006: 144)* menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui literasi. Korelasi kuat antara *gross domestic product* per kapita dengan indikator pembangunan, seperti angka harapan hidup, kematian bayi, hak politik dan sipil, serta beberapa indikator kualitas lingkungan, terutama literasi orang dewasa, yang diartikan dalam indeks pembangunan manusia.

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa harus hadir sebagai sistem sosial yang inklusif di masyarakat yang dapat terjangkau secara terbuka, mudah, dan murah dengan basis TIK untuk peningkatan budaya literasi masyarakat.

TIK mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi informasi membuka kesempatan baru bagi perpustakaan untuk mengembangkan koleksi dari format konvensional ke format digital, mengembangkan layanan *onsite* ke layanan *online*, atau secara kompleksitas pengelolaan perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital. Hal ini selaras dengan amanat UU Perpustakaan Pasal 14 Ayat 3 bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan TIK.

Implementasi *Society 5.0* di sejumlah negara maju yang mengutamakan peran masyarakat cerdas dengan inovasi di bidang teknologi sebagai ujung tombaknya. Isu *Society 5.0* berpengaruh sangat besar terhadap layanan publik dimana masyarakat lebih banyak menuntut kemudahan dan transparansi dalam pelayanan publik. Salah satu layanan publik yang banyak mengalami perubahan adalah perpustakaan. Konsep *smart library* akan sangat populer, segala benda teknologi yang ada di dalam perpustakaan akan terintegrasikan dengan teknologi. Mulai dari data keanggotaan, hingga data koleksi yang akan bekerja secara pintar. Salah satunya dengan menggunakan *big data analytics* dan kecerdasan buatan. Konsep *smart library* akan banyak diadopsi saat ini. Peran manusia pun di bidang perpustakaan semakin minim

dan tergantikan dengan teknologi. Pada masa depan koleksi digital akan lebih banyak dibanding koleksi tercetak, kecerdasan buatan akan menggantikan peran dalam layanan.

Perpustakaan sangat berpotensi besar untuk berintegrasi dengan isu *Society 5.0*. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan UU Perpustakaan dan UU SSKCKR sadar betul mengenai potensi besar yang bisa dimanfaatkan sebagai inovasi dalam menyambut isu *Society 5.0*.

Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi Indonesia dalam peningkatan SDM dan salah satu cara pendukung agar Indonesia menjadi negara maju. Bonus demografi tersebut diperkirakan bakal membawa Indonesia ke posisi puncaknya. Indonesia di masa depan diprediksi akan berada di kekuatan ekonomi nomor empat secara global. Negara-negara Eropa pun akan terlewati oleh Indonesia pada tahun 2030. Untuk mempersiapkan masa puncak kemajuan ekonomi digital di tanah air, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan memberikan layanan perpustakaan berbasis *cloud computing*, *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *digital business*.

Menindaklanjuti fenomena tersebut Perpustakaan Nasional mengajukan reorganisasi untuk mengubah Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejumlah potensi yang bisa diadopsi pada struktur organisasi perpustakaan yang baru akan ditampung melalui salah satu fungsi Perpustakaan Nasional, yaitu fungsi deposit.

UU SSKCKR merupakan dasar hukum bagi Perpustakaan Nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat deposit nasional. Sesuai dengan reorganisasi

perpustakaan yang baru, fungsi ini akan dijalankan oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan serta Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. UU SSKCKR ini membuka dua peluang besar bagi pengembangan perpustakaan, terutama dalam dua aspek berikut:

- **Digital Publishing Market**

Konsepsi terkait pasar terbitan digital merupakan implementasi dari konsep penerbitan analog ke dalam ranah konsepsi digital di mana penerbitan digital berkaitan dengan penyediaan konten di berbagai platform melalui perangkat elektronik terkomputerisasi. Teknologi digital terdiri dari berbagai platform untuk konten video, audio, dan teks, termasuk situs web, blog, dan situs jejaring sosial ke dalam penerbitan analog. Konsep ini adalah bagaimana mempertemukan penerbit, penulis, dan pembaca ke dalam suatu tempat yang sama dan Perpustakaan Nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini. UU SSKCKR menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional mempunyai potensi yang sangat besar untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan terkait industri penerbitan di Indonesia.

- **e-Deposit**

Perpustakaan Nasional merupakan perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan, yang diterbitkan di sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan “deposit”, baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan. Perpustakaan Nasional juga umumnya menjalankan fungsi sebagai berikut: menyusun bibliografi nasional; menyimpan dan memutakhirkan koleksi asing yang bernilai tinggi dan representatif termasuk buku mengenai negara yang bersangkutan; bertindak sebagai pusat bibliografi nasional; menyusun katalog induk; dan menerbitkan bibliografi nasional retrospektif.

Konsep e-Deposit merupakan karya elektronik atau bahan perpustakaan elektronik (*electronic library material*) yang tersedia secara *online* dan *offline*. Karya elektronik *online* adalah karya dikomunikasikan di (atau melalui) internet. Karya elektronik yang dipublikasi *online* mencakup *e-book*, *e-journal*, dan *website*. Sedangkan karya elektronik *offline* adalah karya yang disebarakan melalui media fisik dan disampaikan

kepada masyarakat. Ada beberapa karakteristik karya elektronik *offline*, seperti materi/publikasi yang nyata, tersedia pada operator data fisik seperti disket dan CD-ROM, dan karya yang diidentifikasi sebagai publikasi elektronik dikemas (*packaged electronic publications*).

Peluang perpustakaan untuk terus berkembang perlu didukung oleh SDM yang unggul dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sehingga tujuan pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai. Dalam rangka pencapaian tujuannya, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan didukung oleh ketersediaan SDM yang memiliki profil seperti terlihat pada Tabel 1.3. dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3. Kekuatan SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	DIREKTUR DEPOSIT & PKP	KELOMPOK DEPOSIT	KELOMPOK PKP	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	S2	-	4	8	12	15,38
2	S1	1	25	26	52	66,67
3	D3	-	4	3	7	8,97
4	D2	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	4	3	7	8,97
JUMLAH		1	37	40	78	100,00

Tabel. 1.4. Kekuatan SDM Berdasarkan Jabatan

NO.	RINCIAN JABATAN	KELOMPOK DEPOSIT	KELOMPOK PKP	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	-	-	1	1,28
2	Pustakawan Ahli Madya	1	11	12	15,38
3	Pustakawan Ahli Muda	7	6	13	16,67
4	Pustakawan Ahli Pertama	15	17	32	41,03
5	Pustakawan Penyelia	6	1	7	8,97
6	Pustakawan Mahir	-	3	3	3,85
7	Pustakawan Terampil	2	2	4	5,13
8	Pengelola KCKR	3	-	3	3,85
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	-	3	3,85
JUMLAH		37	40	78	100,00

1.5.2. Permasalahan

Ditinjau dari dampak lingkungan strategis yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

a. Implementasi UU SSKCKR belum maksimal

Sampai dengan tahun 2019, implementasi UU SSKCKR belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan belum rampungnya pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksana UU SSKCKR, sehingga belum tersedia regulasi yang secara terperinci mengatur tentang penyerahan KCKR, pembinaan dan sanksi administrasi bagi penerbit, pengelolaan hasil SSKCKR, peran serta masyarakat, dan penghargaan kepada penerbit dan produsen karya rekam.

Belum tersedianya PP tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan penerbit dan produsen karya rekam dalam menyerahkan terbitannya. Saat ini tingkat kepatuhan penerbit dan produsen karya rekam pelaksana UU SSKCKR masih dalam level belum patuh. Level belum patuh didapatkan dengan membandingkan antara jumlah potensi terbitan dari seluaruh penerbit dan produsen karya rekam yang ada di Indonesia dengan jumlah pelaksana UU SSKCKR pada pangkalan data penerimaan KCKR yang berhasil terhimpun. Potensi terbitan tersebut pada tahun 2019 adalah sejumlah 169.892 judul, sementara hasil pelaksanaan kewajibannya adalah sejumlah 71.476 judul. Perbandingan potensi terbitan dan hasil pelaksanaan kewajiban UU serah simpan oleh penerbit dan pengusaha rekaman dapat dilihat pada Grafik 1.5.



Grafik 1.5. Grafik Perbandingan Potensi Terbitan dan Hasil Pelaksanaan Kewajiban UU SSKCKR Tahun 2019

Dalam RPP Pelaksana UU SSKCKR disebutkan bahwa salah satu dasar pemberian penghargaan kepada penerbit dan pengusaha rekaman adalah survei tingkat kepatuhan. Survei Tingkat Kepatuhan adalah sebuah penilaian dalam bentuk survei kesesuaian jumlah antara KCKR yang terbit di Indonesia, mengenai Indonesia, dan oleh orang Indonesia dengan yang tersimpan dan terkelola di Perpustakaan Nasional yang dapat dijadikan landasan bagi pengukuran tingkat kepatuhan dari para pelaksanaan serah karya cetak dan karya rekam di seluruh Indonesia.

b. Kekurangan ruang penyimpanan koleksi KCKR

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam bagian ke tiga Pasal 19 tentang Sarana dan Prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai: lahan; gedung; ruang; perabot; dan peralatan yang mana dalam hal ini harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan survei kebutuhan ruangan deposit untuk penyimpanan koleksi KCKR hanya tersedia sampai 2020. Ketersediaan ruang penyimpanan koleksi KCKR akan menjamin kelestarian fisik dan isi bahan perpustakaan yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Perpustakaan Nasional belum menemukan skema yang paling cocok bagi anggaran pengadaan ruang depo penyimpanan baru untuk koleksi KCKR hasil pelaksanaan UU SSKCKR.

Dari data kajian kebutuhan ruang, sarana penyimpanan koleksi, dan SDM pengelola KCKR pada Direktorat Deposit Bahan Pustaka tahun 2018, jumlah ruangan yang belum terpakai untuk penyimpanan KCKR tinggal 365 m². Kebutuhan penambahan lokal ruangan diperkirakan sebesar 201,8 m² per tahun dan kebutuhan rak per tahun mencapai 144 rak *double face* 10 ambal. Pada tahun 2020 ruangan yang belum terpakai tersebut sudah dipastikan akan terisi semua sehingga perlu direncanakan penyediaan ruang depo penyimpanan baru.

c. Pelaksanaan sanksi administratif yang belum terlaksana

Sebagai sebuah produk hukum yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban, UU SSKCKR memberikan sanksi-sanksi kepada penerbit dan pengusaha rekaman

yang tidak patuh melaksanakan UU ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8, penerbit dan pengusaha rekaman yang tidak melaksanakan dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin. Sanksi administratif diberikan atas rekomendasi dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.

Sejak UU SSKCKR ini disahkan, Perpustakaan Nasional belum pernah menegakkan sanksi administratif tersebut kepada penerbit dan pengusaha rekaman. Rekomendasi pemberian sanksi administratif seyogyanya menjadikan para penerbit dan pengusaha rekaman patuh melaksanakan UU SSKCKR.

d. Kekurangan kapasitas infrastruktur teknologi informasi

Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan berupaya menyediakan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung kerja staf dan digunakan untuk mendukung layanan kepada penerbit dan pengusaha rekaman. Kapasitas penyediaan infrastruktur ini sangat tergantung bidang lain di organisasi Perpustakaan Nasional. Infrastruktur teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam mendukung program *digital publishing market* dan aplikasi e-Deposit. Sekarang ini infrastruktur teknologi informasi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan terbilang masih kurang. Sejalan dengan kegiatan reorganisasi Perpustakaan Nasional, keberadaan Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional diharapkan mampu memberikan solusi permasalahan pengembangan infrastuktur teknologi informasi, terutama dalam kegiatan penghimpunan KCKR.

e. Terbatasnya ketersediaan buku digital terbitan dalam negeri

Sebagian besar penerbit buku di Indonesia belum memahami sepenuhnya potensi penerbitan buku digital dan masih menitikberatkan penerbitan buku dalam bentuk tercetak. Padahal potensi bisnis penerbitan buku digital cukup menjanjikan seiring dengan berkembangnya konsep layanan perpustakaan berbasis digital (*e-library*) di sejumlah wilayah di Indonesia. Konsep tersebut sangat membutuhkan konten informasi digital dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

f. Semakin banyaknya penerbit media massa yang mengalihkan penerbitannya ke bentuk digital

Pada era informasi digital ini tidak sedikit penerbit di dalam negeri, khususnya dalam lingkup penerbitan media massa (majalah, jurnal, surat kabar, tabloid, dsb.), yang menghentikan penerbitan dalam bentuk tercetak dan sepenuhnya beralih ke penerbitan dalam bentuk digital. Di satu sisi hal ini memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya ketersediaan konten informasi digital dan memberikan berbagai kemudahan, namun di sisi lain berdampak pada berkurangnya akses masyarakat terhadap informasi dalam bentuk tercetak. Meskipun dewasa ini semakin banyak masyarakat yang memiliki kecenderungan mengakses informasi melalui perangkat digital, namun kebutuhan terhadap informasi dalam bentuk fisik/tercetak belum tergantikan sepenuhnya karena memiliki beberapa kelebihan tersendiri.

g. Belum optimalnya upaya penelusuran terbitan muatan lokal

Indonesia dengan keberagaman masyarakatnya memiliki potensi besar dalam hal penerbitan berbagai informasi muatan lokal yang mengangkat nilai-nilai budaya asli Indonesia. Namun, selama ini upaya yang dilakukan dalam menelusuri keberadaan terbitan muatan lokal tersebut masih belum optimal karena begitu luasnya wilayah Indonesia dan informasi mengenai keberadaannya tersebut masih relatif terbatas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Perpustakaan Nasional

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

2.2. Misi Perpustakaan Nasional

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 **revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

2.3. Tujuan Pembangunan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, maka Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan menetapkan tujuan: “Peningkatan Koleksi Nasional yang Lengkap dan Mutakhir melalui Penghimpunan KCKR dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan”.

2.4. Sasaran Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Sasaran Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Tahun 2020-2024 diformulasikan dari kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan sebagai *outcome* atau dampak. Sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Koleksi Nasional Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan	Persentase Peningkatan Jumlah Koleksi KCKR yang Terhimpun
Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir	Persentase Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan yang Lengkap

Strategi pencapaian Sasaran Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan adalah: “Pengembangan Deposit dan Koleksi Nasional yang Lengkap”.

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah:

- Dokumen Kebijakan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
- Pengembangan Deposit dan Koleksi Nasional yang Lengkap
- Bahan Perpustakaan yang Diadakan dan e-Journal yang Dilanggan
- Naskah Kuno yang Diadakan

2. Perspektif Proses Internal (*Internal Process*)

Sasaran Program yang akan dicapai oleh Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan adalah:

a. Tersusunnya Dokumen Kebijakan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.

Indikator Kinerja Utama dari sasaran program ini adalah:

- Penyusunan Kebijakan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
- Evaluasi Kegiatan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

b. Penghimpunan Koleksi KCKR.

Indikator Kinerja Utama dari sasaran program ini adalah:

- Sosialisasi KCKR

- Pengelolaan KCKR
- Penghargaan Serah Simpan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018

c. Pengadaan Bahan Perpustakaan dan *e-Journal*.

Indikator Kinerja Utama dari sasaran program ini adalah:

- Identifikasi Pengadaan Bahan Perpustakaan
- Pengadaan Bahan Perpustakaan
- Langganan Bahan Perpustakaan *e-Journal* dan *e-Database*
- Pasca Pengadaan Bahan Perpustakaan

d. Pengadaan Naskah Kuno

Indikator Kinerja Utama dari sasaran program ini adalah:

- Identifikasi Pengadaan Naskah Kuno
- Pengadaan Naskah Kuno

2.5. Peta Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Peta Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Strategis Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Sasaran Strategis (SS):

SS1. Peningkatan Koleksi Nasional Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mukthahir

Sasaran Progran (SP):

SP1. Pengembangan Deposit dan Koleksi Nasional yang Lengkap

Sasaran Kegiatan (SK):

SK1. Tersusunnya Dokumen Kebijakan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

SK2. Penghimpunan Koleksi KCKR

SK3. Pengadaan Bahan Perpustakaan dan *E-Journal*

SK4. Pengadaan Naskah Kuno

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu:

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
 - a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
 - b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi: (1) pengembangan mitra perpustakaan; (2) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Strategi yang ditetapkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional tersebut adalah:

- a. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

- b. Pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui:
- Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir
 - Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno
- c. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional yang baik dan handal.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang bersesuaian dengan tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional dapat direalisasikan dengan melaksanakan inisiatif strategis sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, yaitu Peningkatan Koleksi Nasional yang Lengkap dan Mutakhir melalui Penghimpunan KCKR dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.

Direktorat Deposit Dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan mempunyai peran strategis dalam mendukung misi Perpustakaan Nasional, yaitu melalui program Pengembangan Deposit dan Koleksi Nasional yang Lengkap yang diwujudkan melalui kegiatan penyusunan dokumen kebijakan deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan, penghimpunan koleksi karya cetak dan karya rekam (KCKR), pengadaan bahan perpustakaan dan langganan *e-journal*, serta pengadaan naskah kuno.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain meliputi:

1. Penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan koleksi KCKR dan yang berkonsekuensi pada perlunya jaminan peraturan perundang-undangan, kualitas pengelolaan KCKR. Penguatan SDM maupun dukungan operasional, optimalisasi peran Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap penerbit dan pengusaha rekaman akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas KCKR.

2. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lingkungan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagai optimalisasi pemberian layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar layanan publik kepada penerbit dan pengusaha rekaman sebagai mitra dari Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.
3. *Deposit Awareness*, yaitu dengan meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan pemahaman mengenai fungsi Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan deposit untuk masyarakat maupun penyelenggara negara. Program kebijakan strategi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan serah simpan KCKR menjadi koleksi nasional
Langkah operasional yang dilakukan antara lain adalah menghimpun koleksi KCKR untuk deposit bahan perpustakaan; meningkatkan intensitas promosi manfaat pelaksanaan UU SSKCKR bagi penulis, penerbit, perusahaan rekaman, dan media massa; melakukan pendekatan dengan asosiasi para wajib serah; melaksanakan forum diskusi (FGD) dengan perpustakaan khusus kementerian dan lembaga negara; melaksanakan interoperabilitas dengan instansi pemerintah dan swasta; meningkatkan aksesibilitas sistem dan promosi pemanfaatan aplikasi e-Deposit bagi penulis, penggubah, penerbit, dan perusahaan rekaman; menghimpun dokumentasi hasil program siaran televisi dan radio di Indonesia; menghimpun literatur kelabu dari berbagai macam seminar konferensi dan diskusi di Indonesia dalam berbagai bidang keilmuan; menghimpun koleksi efemeral dari berbagai macam aktivitas publik; menghimpun karya-karya terbitan dan rekaman pertama untuk kepentingan historis; memberikan penghargaan kepada penerbit, perusahaan rekaman, dan penulis yang aktif dalam pelaksanaan UU SSKCKR; dan mengembangkan koleksi Indonesiana yang lengkap.
 - b. Tersusunnya dokumen kebijakan deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan
UU SSKCKR akan terus disosialisasikan dan disusun Peraturan Pelaksanaannya. Amanat UU tersebut kemudian diimplementasikan melalui berbagai peraturan di tingkat lembaga, di antaranya adalah kebijakan

pengembangan koleksi perpustakaan, peraturan perundang-undangan SSKCKR, dan standar pengelolaan SSKCKR. Kebijakan pengembangan koleksi bertujuan memberikan pedoman dalam menyelenggarakan pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan, baik melalui pembelian, hadiah, hibah, maupun tukar-menukar dengan menunjukkan sejumlah langkah/prosedur yang perlu ditempuh agar dalam pemilihan, seleksi, dan pengelolaan koleksi perpustakaannya tepat dan berdaya guna. Sementara peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan SSKCKR bertujuan memberikan pedoman dalam mengoptimalkan pengelolaan koleksi hasil SSKCKR, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional untuk memperkuat koleksi nasional melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan koleksi nasional

Koordinasi pengembangan koleksi nasional yang selama ini telah diselenggarakan secara berkala harus terus dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pihak yang berkecimpung dalam kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan dalam skala yang lebih luas lagi. Pihak-pihak tersebut antara lain meliputi instansi berwenang, pengelola perpustakaan, penerbit/produsen bahan perpustakaan, asosiasi penerbitan, komunitas di bidang literasi, dan sebagainya.

Melalui agenda koordinasi tersebut, diharapkan akan terjaring lebih banyak masukan dan gagasan dari lingkungan eksternal Perpustakaan Nasional sehingga upaya penguatan koleksi nasional dapat terwujud. Selain itu, koordinasi tersebut juga dapat dijadikan sebagai ajang transfer pengetahuan dan informasi, khususnya dalam hal pengembangan koleksi perpustakaan, sehingga pemahaman secara komprehensif mengenai hal tersebut dapat lebih merata di seluruh pengelola perpustakaan.

b. Pengadaan semakin banyak sumber informasi elektronik (*e-resources*)

Saat ini Perpustakaan Nasional sudah menyediakan berbagai sumber informasi dengan format elektronik (*e-resources*) dalam berbagai subjek ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh pemustaka secara *online* kapan saja dan

di mana saja. Meski demikian, tuntutan akan kebutuhan referensi, terutama sekali untuk menunjang kegiatan penelitian, mendorong Perpustakaan Nasional untuk terus menambah koleksi *e-resources* yang dilayankan, baik dari segi jumlah maupun ragam subjeknya. Hal tersebut tentunya akan memberikan alternatif penelusuran informasi dan referensi yang beragam untuk pemustaka, sehingga diharapkan akan berdampak pada semakin berkualitasnya dunia penelitian dan ilmu pengetahuan di Indonesia.

c. Sosialisasi mengenai potensi penerbitan buku digital

Seperti telah disebutkan di bagian pendahuluan, sebagian besar penerbit buku di Indonesia belum memahami sepenuhnya potensi penerbitan buku digital, padahal potensi bisnis penerbitan buku digital dewasa ini cukup menjanjikan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh penerbit buku agar mengalihmediakan terbitan cetaknya ke dalam bentuk digital yang dapat diakuisisi oleh pengelola perpustakaan sehingga tersedia lebih banyak alternatif akses bagi masyarakat dalam mendayagunakan koleksi perpustakaan. Dengan demikian, akan semakin banyak konten informasi yang bisa dibagikan kepada masyarakat dan dapat pula menjaring pemustaka yang lebih luas lagi.

d. Optimalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengembangan koleksi naskah kuno nusantara

Selama ini upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dalam mengembangkan koleksi naskah kuno sudah cukup baik, namun pada pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala, seperti pada identifikasi keberadaan/kepemilikan naskah kuno di masyarakat yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dunia pernaskahan, dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan strategi yang dapat mengoptimalkan pengembangan koleksi naskah kuno, antara lain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang memiliki informasi mengenai keberadaan naskah kuno di masyarakat, serta menetapkan standar penilaian dalam pengadaan naskah kuno sehingga naskah kuno yang diadakan benar-benar memiliki kualitas baik dan layak didayagunakan oleh pemustaka. Selain itu perlu juga

dilakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat mengenai pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno sehingga tercipta kesepahaman dan sinergi antara Pemerintah dan masyarakat dalam upaya melestarikan fisik dan kandungan naskah kuno nusantara sebagai kekayaan khazanah intelektual bangsa yang bernilai tinggi.

e. Penguatan pengelolaan pangkalan data pengembangan koleksi

Perpustakaan Nasional sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan pangkalan data pengembangan koleksi yang memadai dan dapat mendukung proses penelusuran kembali informasi secara cepat, tepat, dan efisien. Sistem tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan informasi terkait tahapan-tahapan dalam kegiatan pengembangan koleksi, salah satunya terkait data bahan perpustakaan yang diseleksi, data jumlah koleksi Perpustakaan Nasional yang sudah terintegrasi dari beberapa unit kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengembangan koleksi, dan seterusnya.

Sistem tersebut sudah tersedia dan sudah dioperasikan secara efektif, namun masih perlu diperkuat dari sisi pengayaan fitur-fitur yang dapat mengakomodir kebutuhan unit kerja dan pengelola data pengembangan koleksi sehingga dapat mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan koleksi, misalnya database bahan perpustakaan *e-resources* yang dilanggan, dan sebagainya.

3.3. Kerangka Regulasi

Tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional dapat berjalan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatannya jika didukung oleh regulasi yang kuat. Kerangka regulasi tersebut antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional;
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; dan
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Target kinerja merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran strategis yang membawa pengaruh atau dampak (*outcome/impact*). Target kinerja sasaran program yang telah ditetapkan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan merupakan turunan dari target kinerja sasaran strategis Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi yaitu mewujudkan layanan prima, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara. Indikator keberhasilan dari target kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional	%	5	5	5	5	5
	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	%	18,43	18,43	19,79	21,18	22,57

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, maka ditetapkan target kinerja sasaran program Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Target Kinerja Sasaran Program Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Koleksi Nasional, Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir	Persentase peningkatan jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	%	5	5	5	5	5
	Persentase Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan yang Lengkap	%	5	6	7	8	9

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program serta kegiatan Perpustakaan Nasional, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan tersebut akan memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. Kerangka pendanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Alokasi Anggaran Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Berdasar Program (dalam ribu rupiah)

KODE	PROGRAM	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
4380	Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	57.828.244	86.814.118	96.744.207	104.377.393	113.581.472

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen resmi yang berisi komitmen dan peta jalan seluruh staf di lingkungan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahunan (2020-2024). Selain itu, dokumen ini merupakan sarana komunikasi antarunit kerja di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat dan mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan budaya bangsa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan mempunyai peranan besar dalam mendorong terwujudnya visi dan misi Pemerintah/Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi.

Renstra Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan merupakan landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta perumusan kebijakan dan program yang berorientasi hasil dengan mempertimbangkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Hambatan dalam pencapaian tujuan strategis perlu dirumuskan solusinya oleh berbagai pihak terkait secara sinergi meliputi koordinasi antarlembaga, sinkronisasi kebijakan, peraturan dan perundangan, dan program pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasinya dalam penyelenggaraan penghimpunan karya cetak dan karya rekam nasional.

Optimalisasi kinerja seluruh staf Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan koordinasi antarlembaga merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan banyak dipengaruhi oleh

kelancaran koordinasi antarunit di lingkungan internal dan eksternal, khususnya dalam program implementasi UU Perpustakaan dan UU SSKCKR yang merupakan program prioritas utama Direktorat Deposit Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi

1. Matriks Kinerja

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			SATUAN TARGET	TARGET					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2021	2022	2023	2024	
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>									
1	Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	1	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	75.5	78.5	80.0	82.0	85.0
		2	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di PERPUSNAS	%	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
		3	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi Koleksi Nasional	%	5	5	5	5	5
		4	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	%	18.43	18.43	19.79	21.18	22.57
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>									
2	Terselenggaranya Layanan Perpustakaan. Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno	5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.8	3.85	3.91	3.97	4.01
		6	Tingkat kepuasan pemustaka	Nilai	80	82	84	86	88
		7	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Persen	8.83	9.53	10.07	10.77	11.47
		8	Persentase Peningkatan Bahan Perpustakaan yang di Alih Mediakan	Persen	8.21	8.9	9.72	10.41	11.1
3	Terselenggaranya Peningkatan Koleksi Nasional, Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir	10	Persentase Penambahan Koleksi Nasional Perpustakaan yang Lengkap	Persen	5	6	7	8	9
		11	Persentase peningkatan jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	Persen	5	5	5	5	5
		12	Persentase peningkatan layanan ISBN dan ISMN	Persen	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>									
4	Terlaksananya Layanan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno	13	Persentase peningkatan alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno	Persen	0.16	0.61	1.00	1.40	1.90
		14	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, pameran, dan desiminasi	Orang	5145	5448	5920	6216	6527
		15	Jumlah NSPK yang disusun	NSPK	10	10	10	10	10

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			SATUAN TARGET	TARGET				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2021	2022	2023	2024
		16 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Layanan Jasa Informasi Perpustakaan, Koleksi Langka dan Naskah Nusantara	Orang	7400259	7575175	7688800	7842573	8038633
5	Terlaksananya Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpunas	17 Jumlah Pusat Unggulan Naskah Nusantara	Lembaga	0	1	6	6	6
		18 Jumlah Akses Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Orang	1672	1837	1990	2150	2320
		19 Tingkat Kepuasan Akses Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Nilai	80	82	84	86	88
6	Terlaksananya konservasi bahan perpustakaan dan naskah kuno	20 Jumlah bahan perpustakaan yang dikonservasi	Eksemplar	31013	31015	38213	40915	42164
		21 Jumlah naskah kuno yang dikonservasi	Eksemplar	815	835	810	820	850
7	Terlaksananya alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno	22 Jumlah bahan perpustakaan yang dialihmediakan	Eksemplar	6000	6000	6000	6000	6000
		23 Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan	Eksemplar	25110	28501	31666	34340	38448
		24 Jumlah Pelestarian Pusat Unggulan Naskah dan Budaya Etnis Nusantara	Lembaga	0	1	6	6	6
8	Terlaksananya pengembangan koleksi	25 Jumlah Dokumen Kebijakan Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang disusun	Dokumen	4	6	6	6	6
		26 Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan e-Journal yang dilanggan	Eksemplar	474657	533904	627887	684396	746381
		27 Jumlah naskah kuno yang diadakan	Eksemplar	128	200	214	231	252
9	Terlaksananya serah simpan karya cetak dan karya rekam	28 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang KCKR	Orang	900	925	950	975	1000
		29 Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun	Eksemplar	347723	367500	385875	405169	425428
		30 Jumlah pelaksanaan kegiatan forum	Forum	1	1	1	1	1
10	Terlaksananya layanan ISBN/ISMN dan penerbitan literatur sekunder	31 ISBN dan ISMN yang diterbitkan	Nomor	80000	84000	88200	92610	97241
		32 Jumlah Literatur Sekunder Yang Diterbitkan	Naskah	9	9	9	9	9
11	Terlaksananya pengolahan bahan perpustakaan	33 Jumlah Dokumen NSPK Bidang Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Dokumen	8	8	8	8	8
		34 Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Diolah	Eksemplar	48000	52800	58080	63888	70276
<i>LEARNIG AND GROWTH PERSPECTIVE</i>								
14	Tersedianya SDM yang kompeten dan profesional	43 Persentase SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di Deputi I dan unit kerja yang dikoordinasikan	Persen	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%
		44 Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) di Deputi I	Nilai	81	82	83	84	85

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			SATUAN TARGET	TARGET					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2021	2022	2023	2024	
15	Terkelolanya anggaran yang efektif dan efisien	45	Realisasi anggaran Deputi I	Persen	98	98	98	98	98
		48	Temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
16	Tersedianya hasil evaluasi dan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	49	Persentasi evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100

2. Matriks Pendanaan

Kode	Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PERPUSTAKAAN NASIONAL	454.777,2	650.139,8	869.353,8	948.070,9	1.037.186,6
057.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	256.847,5	420.402,4	555.151,3	608.555,8	658.826,9

LAMPIRAN 2

Matriks Kerangka Regulasi

NO.	ARAH KEBIJAKAN REGULASI	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					
2	Peraturan Perpustakaan Nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam					
3	Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional					
4	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi					